

PEMETAAN CABANG DAN RANTING MUHAMMADIYAH DKI JAKARTA TAHUN 2018

Mubarak Ahmad¹, Muhib Rosyidi², Adi Damanhuri³

¹ Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
mubarak@uhamka.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
muhib@uhamka.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
adidamanhuri@uhamka.ac.id

ABSTRAK

Muhammadiyah merupakan organisasi besar di Indonesia yang bergerak dalam ranah keagamaan menjadi kekuatan mempererat kesatuan umat Islam. Keberadaan organisasi ini tidak lepas dari peran akar organisasi yang terletak pada Cabang dan Ranting. Pemetaan cabang dan ranting bagian terpenting dalam melihat kondisi riil keluarga Muhammadiyah. Berdasarkan pemetaan terdahulu pada tahun 2012 ditemukan masih banyak Cabang dan Ranting Muhammadiyah DKI Jakarta yang masih belum memiliki asset amal usaha serta tidak rutin melakukan pengajian pengurus dan anggota. Dalam rentang 6 tahun, dibutuhkan pembaharuan data Cabang dan Ranting Muhammadiyah di DKI Jakarta untuk melihat kecenderungan perkembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peta perkembangan cabang dan ranting Muhammadiyah yang ada di wilayah DKI Jakarta secara detail dan komprehensif sekaligus menyingkap masalah-masalah yang terjadi di Muhammadiyah akar rumput. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Analisis dilakukan dengan mencari serta menyusun data-data lapangan yang selanjutnya di kategorisasi (*coding*) berdasarkan karakteristik-karakteristik yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Cabang dan Ranting Muhammadiyah dalam rentang tahun 2012-2018. Selain jumlah Cabang, Ranting, dan Amal Usaha, aktivitas warga Muhammadiyah pun mengalami peningkatan khususnya dalam pembinaan pengurus dan anggota melalui aktivitas pengajian Ranting dan Cabang serta mulai lahirnya korps instruktur Baitul Arqam yang menjadi perkaderan utama dalam persyarikatan Muhammadiyah.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Cabang, Ranting, DKI Jakarta.

ABSTRACT

Muhammadiyah is a big moslem organization which is one of power that is unite moslem in Indonesia. This organization can not separated from the root of the organization itself that we called as subdivision and branch. Subdivision and branch mapping is the important part in seeing the real condition of Muhammadiyah family. Based on the last mapping in 2012, it was found that lots of Muhammadiyah subdivision and branch in DKI Jakarta still don't have charity efforts yet and there is no routine recitation for the Muhammadiyah administrator and member. In the span of 6 years, it is

needed to renewing the data of Muhammadiyah subdivision and branch. This research is aimed to found DKI Jakarta's Muhammadiyah subdivision and branch mapping in detail and comprehensive and also to reveal the problems that occur in grassroot of Muhammadiyah. This research is a descriptive qualitative method which is using observation, interview, documentation and data triangulation. Analysis used to find and arrange the data field and next categorized (coding) the characteristics based on the characteristic that have been determined. The research result shows that there is an enhancement in a number of Muhammadiyah subdivision, branch and the charity efforts in span of years 2012-2018. Beside the enhancement of the numbers of subdivision, branch and charity efforts, the activity of Muhammadiyah members increase especially in development of the administrator and members through recitation in DKI Jakarta's Muhammadiyah subdivision and branch also starting the Baitul Arqam instructor corps which is being the Muhammadiyah main cadre.

Keywords: Muhammadiyah, Subdivision, Branch, DKI Jakarta.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah sejak berdiri tahun 1912 menegaskan diri sebagai gerakan Islam yang berjuang menyebarkan dan memajukan ajaran Islam di Indonesia yang diilhami oleh firman Allah SWT dalam surat Ali Imran 104. Misi Muhammadiyah tersebut dikenal dengan gerakan dakwah dan tajdid yang diwujudkan melalui kepeloporan dalam pembaruan pemahaman agama, reformasi sistem pendidikan Islam, pengembangan pranata pelayanan-pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), memajukan peran perempuan muslim (Aisyiyah) di ruang publik, pengorganisasian zakat dan haji, merintis taman pustaka dan publikasi, tabligh yang mencerdaskan, dan mengembangkan amaliah Islami yang memajukan kehidupan.

Dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah telah berkiprah melewati berbagai fase zaman yang sarat dinamika yang dihadapi dengan penuh keikhlasan dan perjuangan tanpa kenal lelah. Di era kolonial, Muhammadiyah berperan dalam pergerakan kebangkitan kebangsaan menuju kemerdekaan Indonesia. Menjelang dan pada awal kemerdekaan, Muhammadiyah berperan aktif dalam meletakkan fondasi negara-bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1994. Pada masa Orde Lama, Muhammadiyah istiqamah dalam menegakkan Negara Republik Indonesia agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan cita-cita kemerdekaan, disertai usaha-usaha modernisasi sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di era Orde Baru, Muhammadiyah terus berkiprah dengan kerja-kerja kemasyarakatan untuk memajukan kehidupan bangsa, disertai sikap hikmah dalam menghadapi situasi politik nasional. Pada era Reformasi, Muhammadiyah menjadi pilar penting masyarakat madani (*civil*

society) dan memelopori era baru Indonesia yang demokratis, menghargai hak asasi manusia, berwawasan kemajemukan, serta bersikap responsif dan kritis kepada pemerintah sesuai dengan Kepribadian Muhammadiyah. Pergerakan Muhammadiyah dalam lintasan satu abad itu merupakan perwujudan dari pembaruan (*tajdid*) yang dipelopori Kyai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri gerakan Islam ini. Spirit pembaruan telah menjadi kesadaran yang melekat dalam gerakan Muhammadiyah generasi awal untuk memahami dan menerjemahkan kembali ajaran Islam ke dalam kerja-kerja kemanusiaan dan kemasyarakatan yang mencerahkan.

Pasca Muktamar Muhammadiyah satu abad di Yogyakarta tahun 2010 lalu, ada beberapa amanat yang harus segera ditunaikan bagi pimpinan persyarikatan, khususnya pada *leading sector* lembaga baru, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) yaitu perlunya pendataan sekaligus pemetaan kekuatan Muhammadiyah di level struktur paling bawah. Struktur paling bawah itu adalah PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) dan PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah).

Sebagian masyarakat di tanah air sudah pernah merasakan buah dari perjuangan Muhammadiyah, berupa amal usaha yang bergerak dalam berbagai hal, di antaranya pendidikan dan kesehatan. Namun, potensi-potensi yang berserak itu hingga saat ini masih belum terdata dengan baik dan rapi, sehingga Muhammadiyah belum dapat memantau perkembangannya dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Sekalipun Muhammadiyah setiap lima tahun sekali memperbaharui data tentang jumlah cabang dan ranting di seluruh tanah air, namun itu semua hanya berupa data mentah tanpa kita tahu bagaimana peta pergerakan dari satu waktu ke waktu selanjutnya. Karenanya, perlu sebuah peta yang akan mencakup bagaimana perkembangan gerakan Muhammadiyah dari waktu ke waktu, apa saja potensi yang ada di masing-masing daerah, serta siapa saja aktor-aktor yang selama ini telah membesarkan gerakan Muhammadiyah. Jika hal ini telah dilakukan, kita dapat melakukan dakwah dan tugas organisasional secara tepat dan terarah. Karena itu, penelitian ini akan membuat pemetaan cabang dan ranting Muhammadiyah di wilayah DKI Jakarta.

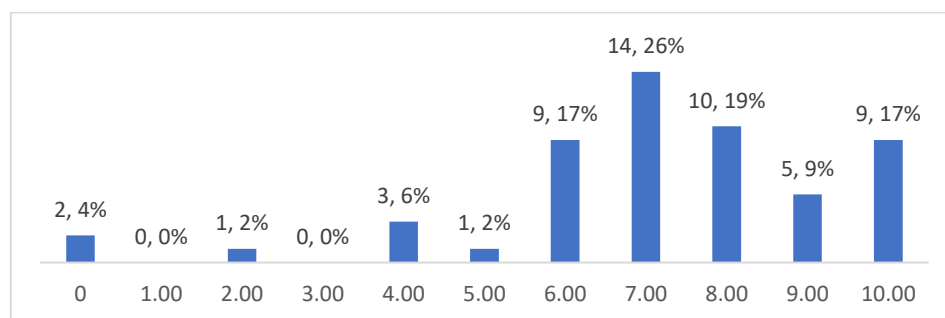
METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Dikatakan kualitatif karena memang hasil yang

ingin dihasilkan adalah kualitas Cabang dan Ranting dalam keaktifannya berorganisasi. Aktifitas organisasi yang cenderung bersifat kualitas baik dan buruk, jalan dan tidaknya akan dipetakan dengan bentuk survey. Data kuantitatif digunakan sebagai penunjang deskripsi data yang diperoleh melalui survey lapangan untuk melihat fluktuasi kegiatan, jumlah amal usaha, maupun rotasi kepemimpinan yang ada dalam Cabang dan Ranting yang akan disurvei.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Cabang di DKI Jakarta



Grafik 1. Jumlah Cabang per-Skor di DKI Jakarta

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa secara umum, hasil skoring aktifitas Pimpinan Cabang Muhammadiyah (selanjutnya disingkat PCM) di DKI Jakarta, ditemukan hanya 9 PCM (sekitar 17% dari total PCM di DKI Jakarta) yang memperoleh skor maksimal (nilai 10). Skor maksimal diperoleh apabila PCM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki sertifikat hak milik atas aset kantor, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin, memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya. Selanjutnya, hasil penelitian menemukan terdapat 5 PCM (sekitar 9% dari total PCM di DKI Jakarta) yang mendapat skor 9, dengan problem pada persoalan tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor dan tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya. Kemudian terdapat 10 PCM (sekitar 19% dari total PCM di DKI Jakarta) yang mendapat skor 8 dan 14 PCM (sekitar 26% dari total PCM di DKI Jakarta) yang mendapat skor 7.

Untuk 12 PCM (sekitar 25% dari total PCM di DKI Jakarta) dengan skor menengah (dengan rentang skor 4 s.d. 6) rata-rata memiliki problem pada kepemilikan aset, tidak adanya korps mubaligh dan pembinaannya, serta tidak rutinnya proses kaderisasi (Baitul Arqam).

Adapun terdapat 3 PCM (sekitar 6% dari total PCM di DKI Jakarta) dengan skor terendah (dengan rentang skor 0 s.d. 3) rata-rata memiliki problem pada minimnya infrastruktur organisasi, baik secara kelembagaan maupun asset, terhentinya regenerasi (Musyawarah Cabang) dan tidak rutinnya proses kaderisasi (Baitul Arqam) sampai dengan vakum atau tidak aktif.

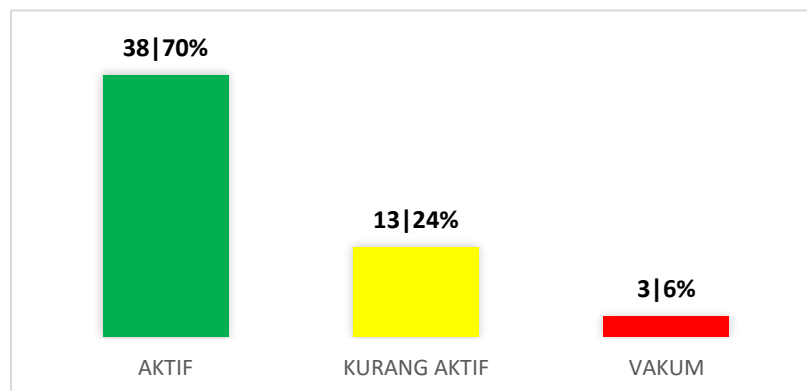
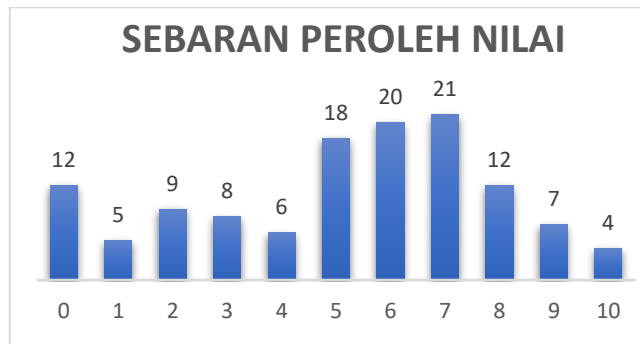


Diagram 1. Tingkat Keaktifan Cabang di DKI Jakarta

Selanjutnya dari kondisi PCM di DKI Jakarta berstatus aktif 38 (sekitar 70% dari total PCM yang ada di DKI Jakarta). Selanjutnya, ada 3 PCM (sekitar 6% dari total PCM yang ada di DKI Jakarta) yang ditengarai tidak aktif/ vakum. Selebihnya, ada 13 PCM (sekitar 24% dari total PCM yang ada di DKI Jakarta) yang ditengarai berstatus kurang aktif.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PCM aktif di DKI Jakarta secara umum masih mendominasi meski idealnya seluruh PCM harus berstatus aktif (100%). Yang menarik dari data ini adalah jumlah PCM pasif dan vakum angkanya cukup tinggi. Problem masing-masing PCM bervariasi, mulai dari terhentinya regenerasi (Musyawarah Cabang) hingga tidak adanya proses kaderisasi (Baitul Arqam).

Kondisi Ranting di DKI Jakarta



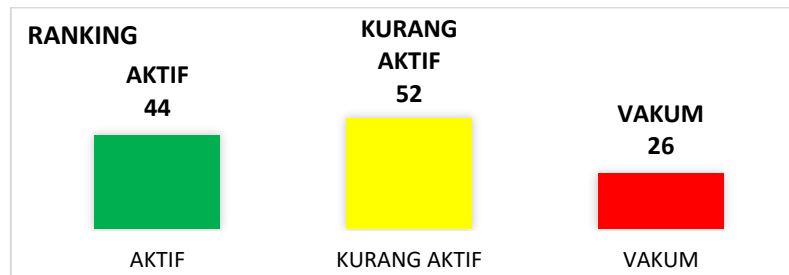
Grafik 2. Jumlah Ranting per-Skor di DKI Jakarta

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa secara umum, hasil skoring aktifitas Pimpinan Ranting Muhammadiyah (selanjutnya disingkat PRM) di DKI Jakarta, ditemukan hanya 4 PRM yang memperoleh skor maksimal (nilai 10). Skor maksimal diperoleh apabila PRM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Ranting, memiliki sertifikat hak milik atas aset kantor, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin, memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 PRM yang mendapat skor 9, dengan problem pada persoalan tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor dan tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya. Kemudian terdapat 12 PRM yang mendapat skor 8 dan 21 PRM yang mendapat skor 7.

Untuk 44 PRM dengan skor menengah (dengan rentang skor 4 s.d. 6) rata-rata memiliki problem pada kepemilikan aset, tidak adanya korps mubaligh dan pembinaannya, serta tidak rutinnya proses kaderisasi (Baitul Arqam).

Adapun terdapat 34 PRM dengan skor terendah (dengan rentang skor 0 s.d. 3) rata-rata memiliki problem pada minimnya infrastruktur organisasi, baik secara kelembagaan maupun aset, terhentinya regenerasi (Musyawarah Ranting) dan tidak rutinnya proses kaderisasi (Baitul Arqam) sampai dengan vakum atau tidak aktif.

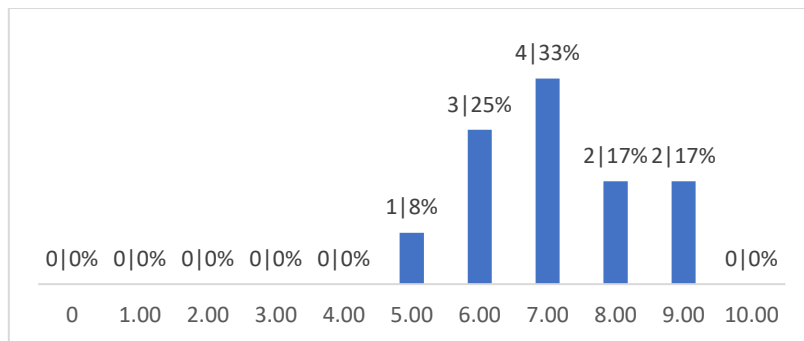
Diagram 2 Tingkat Keaktifan Ranting di DKI Jakarta



Dari diagram diatas menunjukkan kondisi PRM di DKI Jakarta berstatus aktif terdapat 44 PRM. Selanjutnya, terdapat 26 PRM yang ditengarai tidak aktif/ vakum dari total PRM yang ada. kemudian terdapat 52 PRM (sekitar 40% dari total PRM di DKI Jakarta) yang ditengarai berstatus kurang aktif . Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PRM aktif di DKI Jakarta secara umum masih tinggi meski idealnya seluruh PRM harus berstatus aktif (100%). Yang menarik dari data ini adalah jumlah PRM Kurang aktif lebih mendominasi PRM yang ada di DKI Jakarta dan angka PRM vakum atau tidak aktif cukup tinggi. Problem masing-masing PRM bervariasi, mulai dari terhentinya regenerasi (Musyawarah Ranting) hingga tidak adanya proses kaderisasi (Baitul Arqam).

Kondisi Cabang di Jakarta Pusat

Grafik 3 Jumlah Cabang per-Skor di Jakarta Pusat

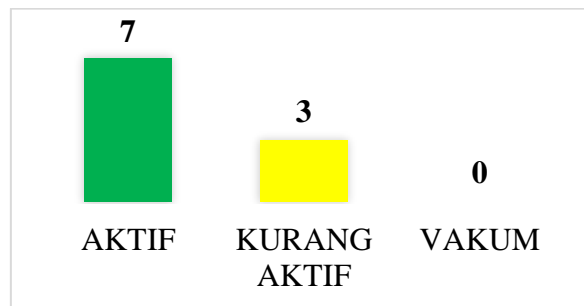


Dari hasil penelitian berdasarkan keaktifan dari 10 PCM tersebut didapatkan hasil olah skor yaitu 8 PCM mendapat skor dengan predikat baik (rentang skor 7 s/d 9). Skor tersebut diperoleh apabila PCM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin namun memiliki problem pada persoalan

tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor dan tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 PCM yang mendapat skor dengan predikat Cukup (4 s/d 6). Kendala yang dihadapi diantaranya adalah minimnya kaderisasi, tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya, tidak rutinnya pengajian dan tidak memiliki AUM.

Diagram 3 Tingkat Keaktifan Cabang di Kota Jakarta Pusat



Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dari keseluruhan PCM di Jakarta Pusat terdapat 7 PCM dalam keadaan aktif yang terdiri dari PCM Kramat, PCM Kemayoran I, PCM Cempaka Putih, PCM Tanah Abang I, PCM Tanah Abang II PCM Tanah Abang III, PCM Tanah Abang IV. Selanjutnya terdapat 3 PCM dalam keadaan kurang aktif yang terdiri dari PCM Senen, PCM Sawah Besar dan PCM Johar Baru.

Kondisi Ranting di Jakarta Pusat

Grafik 4 Jumlah Ranting per-Skor di Jakarta Pusat

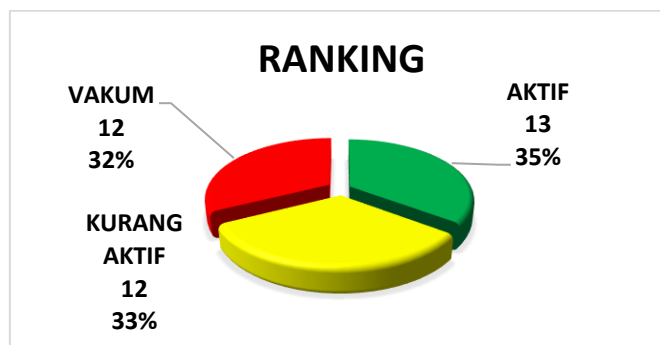


Berdasarkan keaktifan dari 37 PRM tersebut didapatkan hasil olah skor yaitu terdapat 13 PRM yang mendapat skor dengan predikat baik (7 s/d 9). Skor tersebut diperoleh apabila PRM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Ranting, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin namun memiliki problem pada persoalan tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor.

Selanjutnya, dari hasil penelitian menunjukkan terdapat 11 PRM yang mendapat skor dengan predikat Cukup (4 s/d 6). Kendala yang dihadapi diantaranya adalah minimnya kaderisasi, kepemilikan aset, tidak rutinnya pengajian dan tidak memiliki AUM.

Adapun terdapat 19 PRM dengan skor terendah (dengan rentang skor 0 s.d. 3) rata-rata memiliki problem pada minimnya infrastruktur organisasi, baik secara kelembagaan maupun aset, terhentinya regenerasi (Musyawarah Ranting) dan tidak rutinnya proses kaderisasi (Baitul Arqam) sampai dengan vakum atau tidak aktif.

Diagram 4 Tingkat Keaktifan Ranting di Kota Jakarta Pusat



Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dari keseluruhan PRM di Jakarta Pusat terdapat 8 PRM dalam keadaan aktif yang terdiri dari PRM Johhar Baru, PRM Rumah sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, PRM Gempol, PRM Kebon Kosong, PRM Gunung Sahari Utara, PRM Mangga Dua Selatan, PRMKebon Melati dan PRM Kemayoran.

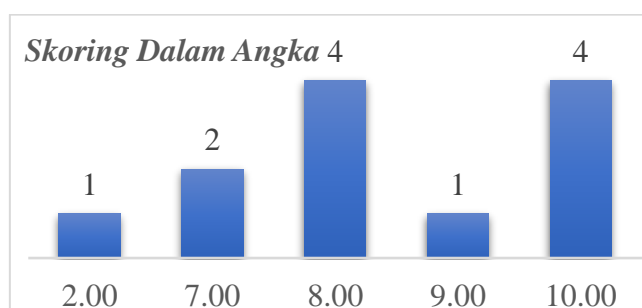
Selanjutnya terdapat 3 PRM yang ditemukan kurang aktif yang terdiri dari PRM Kebon Melati III, PRM Pejompongan II, PRM Pejompongan III.

Terdapat 8 PRM yang diketahui Vakum/tidak aktif yang terdiri dari PRM Petamburan 5, PRM Cempaka Putih Timur, PRM Rawasari, PRM Kartini, PRM Karang Anyar, PRM Kwitang, PRM Kramat Pulo dan PRM Petamburan 4.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan selain beberapa permasalahan diatas terdapat berbagai persoalan yang menjadi sorotan khusus PCM dan PRM di Jakarta Pusat seperti permasalahan kondisi struktural, komunikasi antara Cabang dengan Ranting, domisili pengurus yang terletak jauh dari wilayah Cabang atau Ranting dan terdapat amal usaha yang terbengkalai.

Kondisi Cabang di Jakarta Selatan

Grafik 5 Jumlah Cabang per-Skor di Jakarta Selatan

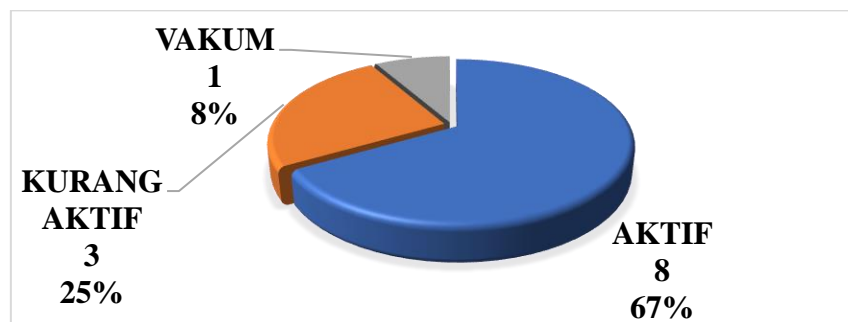


Berdasarkan keaktifan dari 11 PCM tersebut didapatkan hasil olah skor yaitu 4 PCM yang mendapat skor maksimal dengan memperoleh nilai 10. Skor maksimal diperoleh apabila PCM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki sertifikat hak milik atas aset kantor, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin, memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya. Selanjutnya diikuti oleh 7 PCM lainnya yang mendapat skor dengan predikat baik (7 s/d 9). Skor tersebut diperoleh apabila PCM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin namun memiliki problem pada persoalan tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor dan tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan terdapat 1 PCM dalam keadaan vakum/tidak aktif yaitu PCM Kebayoran Baru Timur. Dari segi perolehan skor PCM Kebayoran Timur memperoleh skor terendah diantara PCM di Jakarta Selatan lainnya. Kendala yang dihadapi PCM Kebayoran Baru Timur diantaranya adalah tidak melaksanakan Musyawarah Cabang, tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya, terhenti pengajian karena

tidak ada pengurus maupun warga yang aktif untuk mengikuti pengajian dan tidak memiliki AUM.

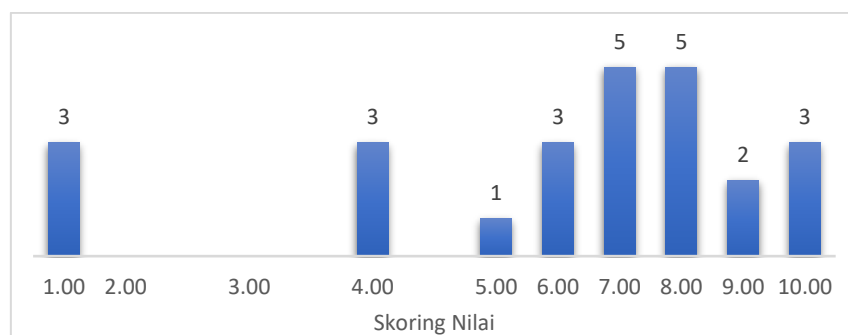
Diagram 5 Tingkat Keaktifan Cabang di Kota Jakarta Selatan



Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi PCM di Jakarta Selatan dapat diambil kesimpulan bahwa dari keseluruhan Pimpinan Cabang Muhammadiyah selanjutnya disingkat (PCM) di Jakarta Selatan (90% dari total PCM di Jakarta Selatan) dalam keadaan aktif. PCM yang aktif diantaranya adalah PCM Pasar Minggu, PCM Tebet Timur, PCM Tebet Barat, PCM Kebayoran Baru, PCM Kebayoran Lama, PCM Pesanggrahan, PCM Kebon Baru, PCM Bukit Duri, PCM Pasar Rumpit, PCM Setiabudi dan (11) Jagakarsa.

Kondisi Ranting di Jakarta Selatan

Grafik 6 Jumlah Ranting per-Skor di Jakarta Selatan

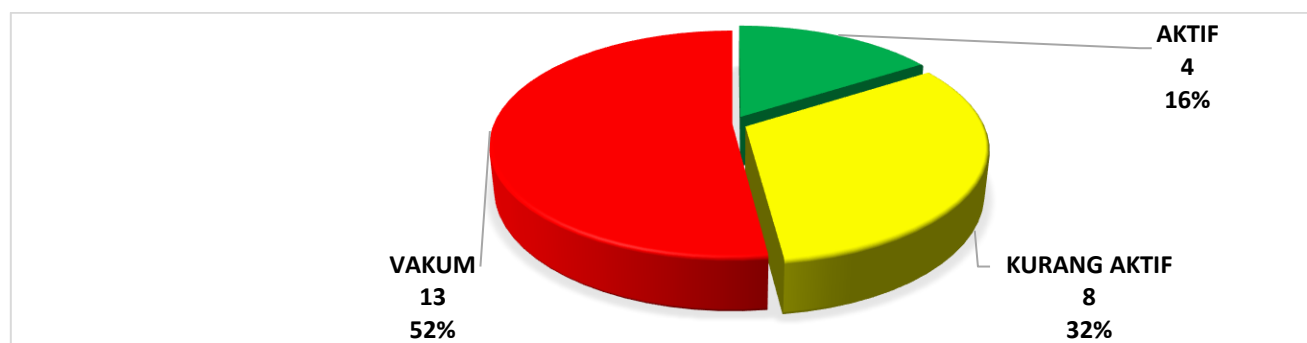


Berdasarkan keaktifan dari 25 PRM tersebut didapatkan hasil dari olah skor yaitu terdapat 3 PRM yang mendapat skor maksimal dengan memperoleh nilai 10. Skor maksimal diperoleh apabila PRM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Ranting,

memiliki sertifikat hak milik atas aset kantor, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin. Selanjutnya diikuti oleh 12 PRM lainnya yang mendapat skor dengan predikat baik (7 s/d 9). Skor tersebut diperoleh apabila PRM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin namun memiliki problem pada persoalan kaderisasi, tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor dan sarana prasarana lainnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan perolehan skor 3 PRM yang mengalami vakum/tidak aktif tersebut memperoleh skor terendah diantara PRM di Jakarta Selatan lainnya. Kendala yang dihadapi ketiga PRM tersebut diantaranya adalah tidak melaksanakan Musyawarah Ranting, banyaknya pengurus yang berpindah domisili, tidak adanya kaderisasi, pengajian yang terhenti karena tidak ada pengurus maupun warga yang aktif untuk mengikuti pengajian, kurangnya perhatian dari PCM dan tidak memiliki AUM.

Diagram 6 Tingkat Keaktifan Ranting di Kota Jakarta Selatan



Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi PRM di Jakarta Selatan dapat diambil kesimpulan bahwa dari keseluruhan PRM di Jakarta Selatan terdapat 15 PRM dalam keadaan aktif. PRM yang aktif diantaranya adalah PRM Rawa Bambu, PRM Bukitduri Puteran, PRM Kebon Baru, PRM Pejaten Timur, PRM Minangkabau, PRM Rawa Jelawe, PRM Pasar Manggis, PRM Tebet Selatan, PRM Tebet Tengah, PRM Menteng Rawa, PRM Panjang, PRM Bukitduri Tanjakan, PRM Ranco, PRM Bintaro, PRM Kp. Melayu Besar.

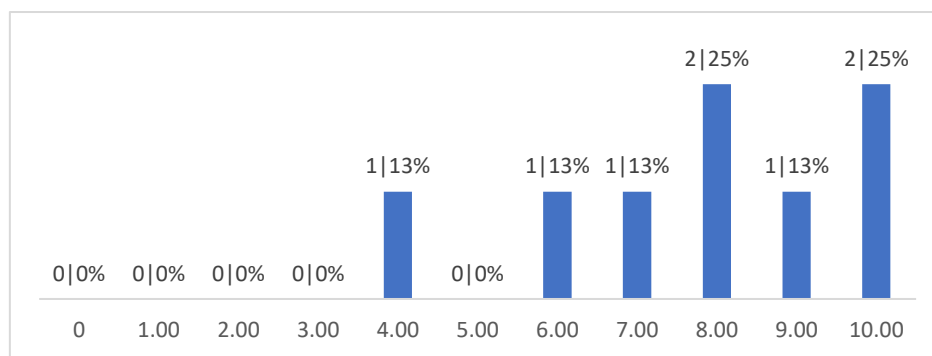
Selanjutnya terdapat 7 PRM yang ditemukan kurang aktif diantaranya adalah PRM Karet Kuningan, PRM Taman Puring, PRM Manggarai, PRM Rawa Bilang, PRM Kp. Melayu Kecil, PRM Petukangan Selatan, PRM Petukangan Utara. Sedangkan terdapat 3

PRM yang diketahui dalam keadaan vakum/tidak aktif, 3 PRM tersebut adalah PRM Poncol, PRM Petogogan dan PRM Rawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan selain beberapa permasalahan diatas terdapat berbagai persoalan yang menjadi sorotan khusus PCM dan PRM di Jakarta Selatan seperti permasalahan kondisi struktural, komunikasi antara Cabang dengan Ranting, domisili pengurus yang terletak jauh dari wilayah Cabang atau Ranting dan terdapat amal usaha yang terbengkalai.

Kondisi Cabang di Jakarta Timur

Grafik 7 Jumlah Cabang per-Skor di Jakarta Timur



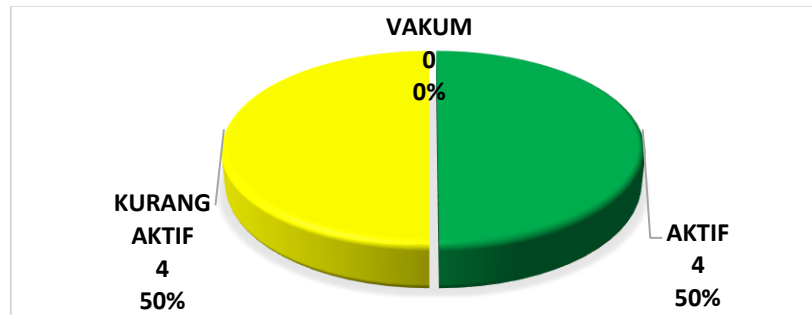
Berdasarkan keaktifan dari 8 PCM tersebut didapatkan hasil olah skor yaitu 2 PCM yang mendapat skor maksimal dengan memperoleh nilai 10. Skor maksimal diperoleh apabila PCM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki sertifikat hak milik atas aset kantor, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin, memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya.

Selanjutnya diikuti oleh 4 PCM lainnya yang mendapat skor dengan predikat baik (7 s/d 9). Skor tersebut diperoleh apabila PCM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin namun memiliki problem pada persoalan tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor dan tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 PCM yang mendapat skor dengan predikat Cukup (4 s/d 6). Kendala yang dihadapi 2 PCM tersebut diantaranya adalah

minimnya kaderisasi, tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya, tidak rutinnya pengajian dan tidak memiliki AUM.

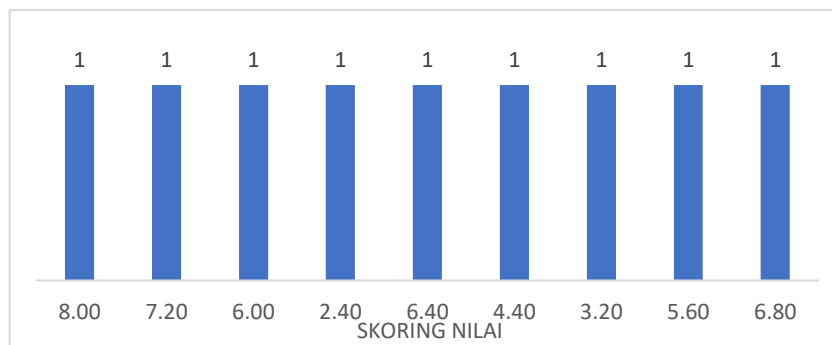
Diagram 7 Tingkat Keaktifan Cabang di Kota Jakarta Timur



Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dari keseluruhan PCM di Jakarta Timur terdapat 6 PCM dalam keadaan aktif yang terdiri dari PCM Jatinegara, PCM Kramatjati, PCM Ciaracas, PCM Utan Kayu, PCM Duren Sawit2, PCM Matraman dan 2 PCM dalam keadaan kurang aktif yang terdiri dari PCM Cakung dan PCM Cipayung.

Kondisi Ranting di Jakarta Timur

Grafik 8 Jumlah Ranting per-Skor di Jakarta Timur

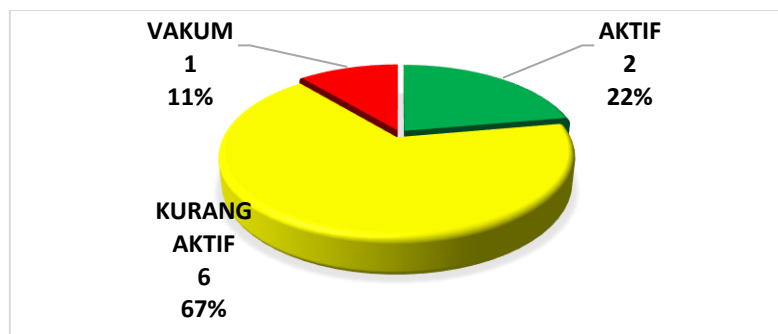


Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keaktifan dari 8 PRM tersebut didapatkan hasil dari olah skor yaitu terdapat 1 PRM yang mendapat skor dengan predikat baik (7 s/d 9). Skor tersebut diperoleh apabila PRM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Ranting, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin namun memiliki problem pada persoalan tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor.

Selanjutnya, dari hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 PRM yang mendapat skor dengan predikat Cukup (4 s/d 6). Kendala yang dihadapi 5 PRM tersebut diantaranya adalah minimnya kaderisasi, kepemilikan aset, tidak rutinnya pengajian dan tidak memiliki AUM.

Dari hasil penelitian menunjukkan perolehan skor terdapat 2 PRM dengan skor terendah (0 s.d. 3) rata-rata memiliki problem pada minimnya infrastruktur organisasi, baik secara kelembagaan maupun aset, terhentinya regenerasi (Musyawarah Ranting) dan tidak rutinnya proses kaderisasi (Baitul Arqam) sampai dengan vakum atau tidak aktif.

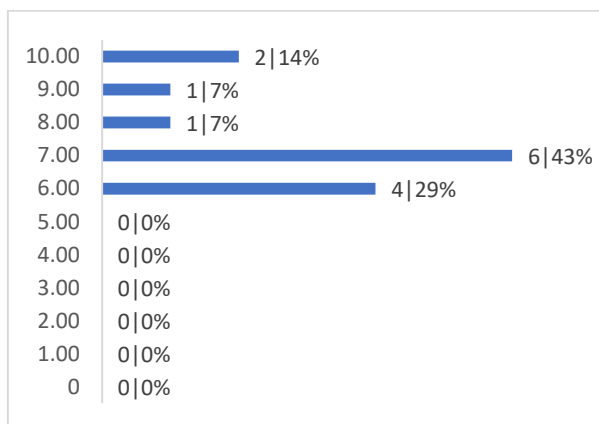
Diagram 8 Tingkat Keaktifan Ranting di Kota Jakarta Timur



Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dari keseluruhan PRM di Jakarta Timur terdapat 2 PRM dalam keadaan aktif terdiri dari PRM Kp. Melayu dan PRM Cawang. Selanjutnya terdapat 6 PRM yang ditemukan kurang aktif diantaranya adalah PRM Bidara Cina, PRM Cililitan, PRM Kebon Pala, PRM Setu, PRM Bambu Apus dan PRM Ciracas.

Kondisi Cabang di Jakarta Barat

Grafik 9 Jumlah Cabang per-Skor di Jakarta Barat

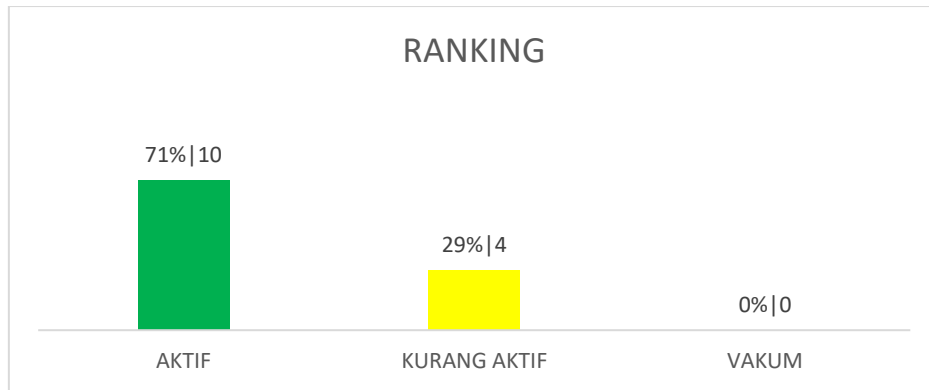


Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keaktifan dari 14 PCM tersebut didapatkan hasil olah skor yaitu 2 PCM yang mendapat skor maksimal dengan memperoleh nilai 10. Skor maksimal diperoleh apabila PCM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki sertifikat hak milik atas aset kantor, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin, memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya.

Selanjutnya diikuti oleh 8 PCM lainnya yang mendapat skor dengan predikat baik (rentang skor 7 s/d 9). Skor tersebut diperoleh apabila PCM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin namun memiliki problem pada persoalan tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor dan tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 PCM yang mendapat skor dengan predikat Cukup (4 s/d 6). Kendala yang dihadapi diantaranya adalah minimnya kaderisasi, tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya, tidak rutinnya pengajian dan tidak memiliki AUM.

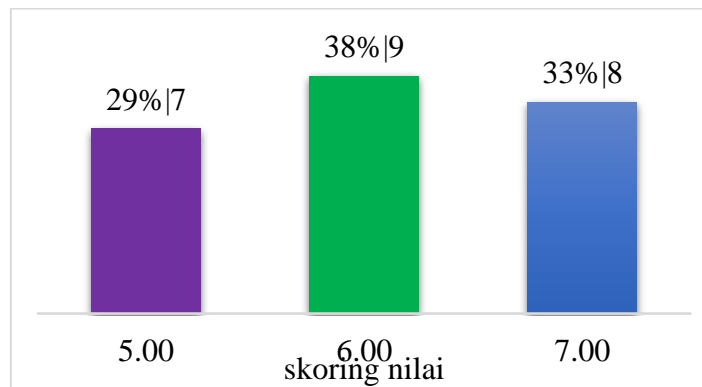
Diagram 9 Tingkat Keaktifan Cabang di Kota Jakarta Barat



Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dari keseluruhan PCM di Jakarta Timur terdapat 9 PCM dalam keadaan aktif yang terdiri dari PCM Komplek Slipi, PCM Cengkareng, PCM Jelambar, PCM Tanjung Duren, PCM Tomang, PCM Slipi Kota Bambu, PCM Tambora dan PCM Palmerah, selanjutnya terdapat 5 PCM dalam keadaan kurang aktif yang terdiri dari PCM Grogo, PCM Kota, Pcm Jati Pulo, PCM Kembangan dan PCM Kebon Jeruk.

Kondisi Ranting di Jakarta Barat

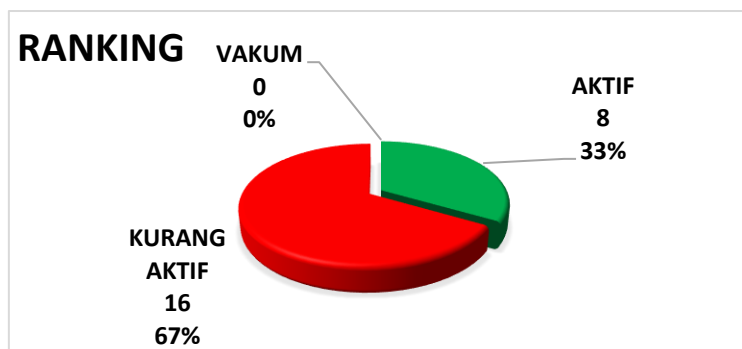
Grafik 10 Jumlah Ranting per-Skor di Jakarta Barat



Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keaktifan dari 24 PRM tersebut didapatkan hasil dari olah skor yaitu terdapat 8 PRM yang mendapat skor dengan predikat baik (7 s/d 9). Skor tersebut diperoleh apabila PRM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Ranting, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin namun memiliki problem pada persoalan tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor.

Selanjutnya, dari hasil penelitian menunjukkan terdapat 16 PRM yang mendapat skor dengan predikat Cukup (4 s/d 6). Kendala yang dihadapi diantaranya adalah minimnya kaderisasi, kepemilikan aset, tidak rutinnnya pengajian dan tidak memiliki AUM.

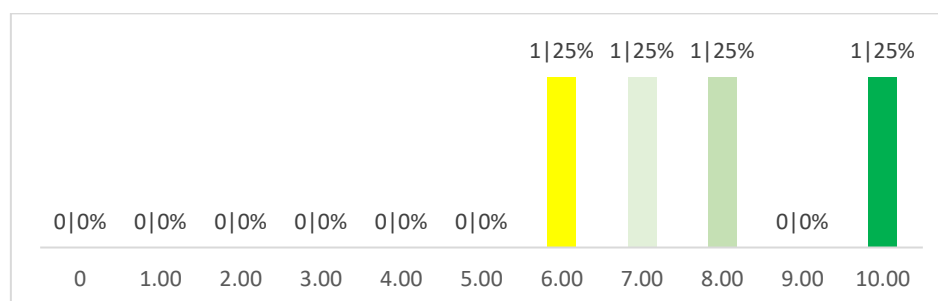
Diagram 2 Tingkat Keaktifan Ranting di Kota Jakarta Barat



Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dari keseluruhan PRM di Jakarta Barat terdapat 8 PRM dalam keadaan aktif yang terdiri dari PRM RW.01, PRM Al-Inayah, PRM Al-Muhtadin, PRM Komplek Tomang, PRM Jati Pulo I, PRM Jati Pulo II, PRM Slipi Selatan, PRM Kebon Jeruk Raya. Selanjutnya terdapat 16 PRM yang ditemukan kurang aktif yang terdiri dari PRM Slipi Utara, PRM Komplek Slipi Tengah, PRM Komplek Slipi Selatan, PRM Kalianyar, PRM Rawa Bahagua, PRM Kramat Bahagia, PRM Grogol, PRM Krukut, PRM Keagungan, PRM Glodok, PRM Angke, PRM Jembatan Besi, PRM Duri Utara, PRM Jwmbatan Lima, PRM Tambora dan PRM Krendang.

Kondisi Cabang di Jakarta Utara

Grafik 11 Jumlah Cabang per-Skor di Jakarta Utara

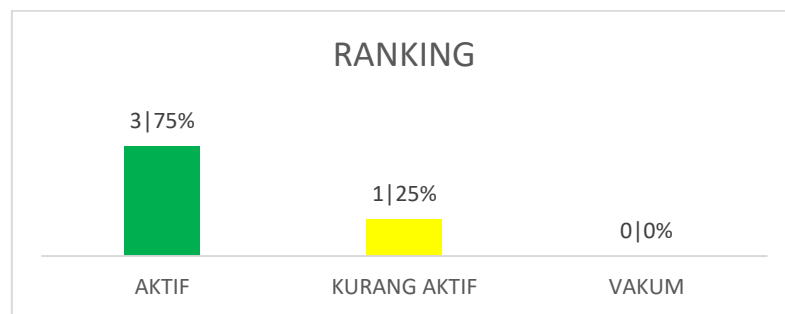


Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan keaktifan dari 4 PCM tersebut didapatkan hasil olah skor yaitu 1 PCM yang mendapat skor maksimal dengan memperoleh nilai 10. Skor maksimal diperoleh apabila PCM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki sertifikat hak milik atas aset kantor, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin, memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya.

Selanjutnya diikuti oleh 2 PCM lainnya yang mendapat skor dengan predikat baik (7 s/d 9). Skor tersebut diperoleh apabila PCM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin namun memiliki problem pada persoalan tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor dan tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya.

Kemudian hasil penelitian menunjukkan terdapat 1 PCM yang mendapat skor dengan predikat Cukup (4 s/d 6). Kendala yang dihadapi diantaranya adalah minimnya kaderisasi, tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya, tidak rutinnnya pengajian dan tidak memiliki AUM.

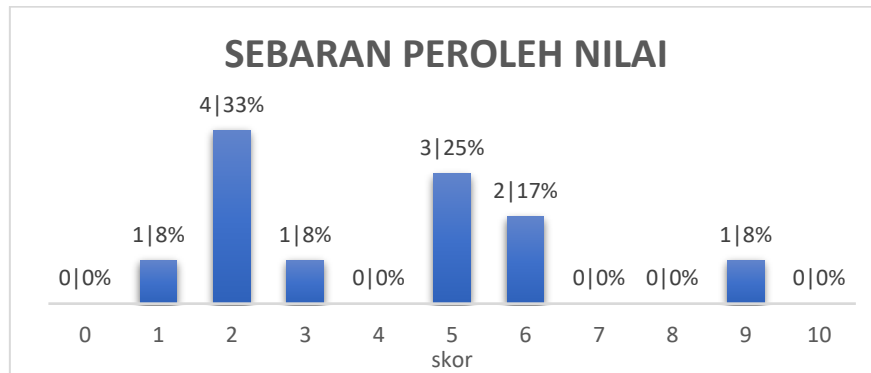
Diagram 3 Tingkat Keaktifan Cabang di Kota Jakarta Utara



Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dari keseluruhan PCM di Jakarta Utara terdapat 3 PCM dalam keadaan aktif terdiri dari PCM Koja, PCM Penjaringan dan PCM Pademangan. Selanjutnya terdapat 1 PCM dalam keadaan kurang aktif yaitu PCM Kelapa Gading.

Kondisi Ranting di Jakarta Utara

Grafik 12 Jumlah Ranting per-Skor di Jakarta Utara

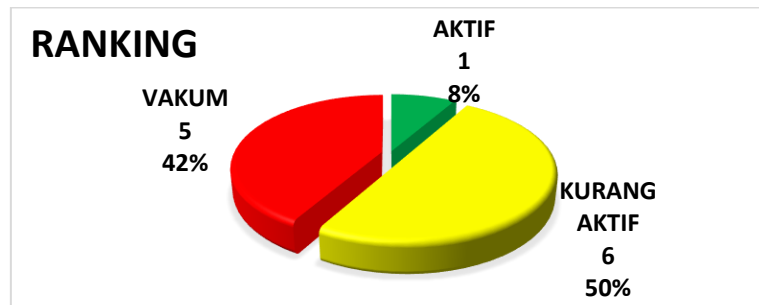


Berdasarkan keaktifan dari 12 PRM tersebut didapatkan hasil dari olah skor yaitu terdapat 1 PRM yang mendapat skor dengan predikat baik (7 s/d 9). Skor tersebut diperoleh apabila PRM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Ranting, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin namun memiliki problem pada persoalan tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor.

Selanjutnya, dari hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 PRM yang mendapat skor dengan predikat Cukup (4 s/d 6). Kendala yang dihadapi 5 PRM tersebut diantaranya adalah minimnya kaderisasi, kepemilikan aset, tidak rutinnya pengajian dan tidak memiliki AUM.

Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan perolehan skor 6 PRM yang mengalami vakum/tidak aktif tersebut memperoleh skor terendah diantara PRM di Jakarta Utara lainnya. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah tidak melaksanakan Musyawarah Ranting, banyaknya pengurus yang berpindah domisili, tidak adanya kaderisasi, pengajian yang terhenti karena tidak ada pengurus maupun warga yang aktif untuk mengikuti pengajian, kurangnya perhatian dari PCM dan tidak memiliki AUM. un terdapat 6 PRM (sekitar 49% dari total PRM di Jakarta Utara) dengan skor terendah (dengan rentang skor 0 s.d. 3) rata-rata memiliki problem pada minimnya infrastruktur organisasi, baik secara kelembagaan maupun asset, terhentinya regenerasi (Musyawarah Ranting) dan tidak rutinnya proses kaderisasi (Baitul Arqam) sampai dengan vakum atau tidak aktif.

Diagram 12 Tingkat Keaktifan Ranting di Kota Jakarta Utara



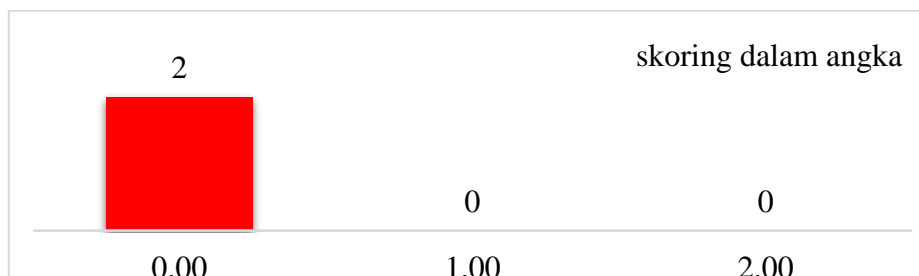
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dari keseluruhan PRM di Jakarta Utara terdapat 2 PRM dalam keadaan aktif terdiri dari PRM Pademangan I dan PRM Pademangan II.

Selanjutnya terdapat 6 PRM yang ditemukan kurang aktif diantaranya adalah PRM Koja, PRM Rawa Badak selatan, PRM Suka Pura, PRM Tugu Utara, PRM Tugu Selatan dan PRM Ancol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dari keseluruhan PRM di Jakarta Utara terdapat 1 PRM dalam keadaan aktif.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 PRM yang diketahui dalam keadaan vakum/tidak aktif terdiri dari PRM Lagoa, PRM Rorotan, PRM Marund dan PRM Semper Timur.

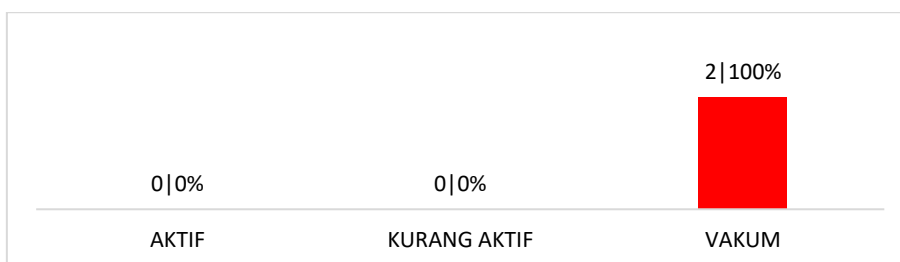
Kondisi Cabang di Kepulauan Seribu

Grafik 13 Jumlah Cabang per-Skor di Kepulauan Seribu



Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa PCM di Kepulauan Seribu saat ini dalam keadaan vakum atau tidak aktif. Berdasarkan hasil data survei, PCM di Kepulauan Seribu terakhir mengadakan Musyawarah Cabang pada tahun 2000. Hingga saat ini belum ada kembali Musyawarah Cabang dan tidak ada garis kepengurusan yang jelas secara struktural. Hingga saat ini PCM Kepulauan Seribu belum memiliki Pimpinan Ranting di wilayah PCM Kepulauan Seribu.

Diagram 13 Tingkat Keaktifan Cabang di Kota Jakarta Utara



Dari diagram diatas dapat diambil kesimpulan bahwa PCM di Kepulauan Seribu tidak aktif atau dalam keadaan vakum/tidak aktif.

KESIMPULAN

1. Aktifitas Pimpinan Cabang Muhammadiyah di DKI Jakarta, ditemukan hanya 9 PCM (sekitar 17% dari total PCM di DKI Jakarta) yang memperoleh skor maksimal (nilai 10).

Skor maksimal diperoleh karena PCM tersebut rutin melaksanakan Musyawarah Cabang, memiliki sertifikat hak milik atas aset kantor, memiliki masjid, mengadakan pengajian rutin, memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya. Selanjutnya, hasil penelitian menemukan terdapat 5 PCM (sekitar 9% dari total PCM di DKI Jakarta) yang mendapat skor 9, dengan problem pada persoalan tidak adanya sertifikat hak milik atas aset kantor dan tidak memiliki korps mubaligh beserta pembinaannya. Kemudian terdapat 10 PCM (sekitar 19% dari total PCM di DKI Jakarta) yang mendapat skor 8 dan 14 PCM (sekitar 26% dari total PCM di DKI Jakarta) yang mendapat skor 7.

2. Untuk 12 PCM (sekitar 25% dari total PCM di DKI Jakarta) dengan skor menengah (dengan rentang skor 4 s.d. 6) rata-rata memiliki problem pada kepemilikan aset, tidak adanya korps mubaligh dan pembinaannya, serta tidak rutinnnya proses kaderisasi (Baitul Arqam).
3. Adapun terdapat 3 PCM (sekitar 6% dari total PCM di DKI Jakarta) dengan skor terendah (dengan rentang skor 0 s.d. 3) rata-rata memiliki problem pada minimnya infrastruktur organisasi, baik secara kelembagaan maupun aset, terhentinya regenerasi (Musyawarah Cabang) dan tidak rutinnnya proses kaderisasi (Baitul Arqam) sampai dengan vakum atau tidak aktif.
4. Dari kondisi PCM di DKI Jakarta berstatus aktif 38 (sekitar 70% dari total PCM yang ada di DKI Jakarta). Selanjutnya, ada 3 PCM (sekitar 6% dari total PCM yang ada di DKI Jakarta) yang ditengarai tidak aktif/ vakum. Selebihnya, ada 13 PCM (sekitar 24% dari total PCM yang ada di DKI Jakarta) yang ditengarai berstatus kurang aktif.
5. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PCM aktif di DKI Jakarta secara umum masih mendominasi meski idealnya seluruh PCM harus berstatus aktif (100%). Yang menarik dari data ini adalah jumlah PCM pasif dan vakum angkanya cukup tinggi. Problem masing-masing PCM bervariasi, mulai dari terhentinya regenerasi (Musyawarah Cabang) hingga tidak adanya proses kaderisasi (Baitul Arqam).

DAFTAR PUSTAKA

Berita Resmi Muhammadiyah No. 01/September 2010

Haedar Nasir, *Ideologi Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, 2013.

Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*, UI Press, 2011

Mustafa W. Hasyim, *Ranting itu Penting*, Bina Press, 2004

Surwandono, *Dinamika Konflik Organisasi Keagamaan Islam Dalam Era Demokratisasi Di Yogyakarta*, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), 2010

Zamahsari, dkk, *Buku Kemuhammadiyah Untuk Perguruan Tinggi*, UHAMKA Press: 2011

Zamahsari, dkk, *Peta Kondisi Cabang dan Ranting Muhammadiyah di Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta: LPCR PP Muhammadiyah, 2012

